



Sorotan IMF

Peristiwa Penting 2017

Petikan dari Laporan Tahunan IMF



Tentang IMF

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund - IMF*) adalah sebuah organisasi global beranggotakan 189 negara yang dibentuk untuk mendorong ekonomi dunia yang sehat. IMF bekerja untuk mengembangkan kerja sama moneter global, menjamin stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

IMF, sebagai lembaga yang fungsinya mengawasi sistem keuangan internasional guna memastikan efektifitas jalannya sistem tersebut, memiliki beberapa tugas pokok yang di antaranya adalah mendorong stabilitas nilai tukar dan memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Misi IMF tersebut memungkinkan negara-negara (dan warganya) untuk membeli barang dan jasa antara satu sama lain dan misi tersebut juga sangat penting guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup.

Semua negara anggota IMF terwakili oleh Dewan Eksekutif, yang membahas dampak nasional, regional, dan global dari setiap kebijakan ekonomi masing-masing anggotanya dan menyetujui pinjaman IMF untuk membantu negara-negara anggota mengatasi masalah temporer neraca pembayaran, serta berbagai upaya pengembangan kapasitas. Laporan Tahunan ini memaparkan kegiatan Dewan Eksekutif dan manajemen dan staf IMF selama tahun anggaran 1 Mei 2016 sampai 30 April 2017. Isi laporan ini mencerminkan pandangan dan diskusi kebijakan Dewan Eksekutif IMF, yang telah berpartisipasi aktif dalam penyiapan *Laporan Tahunan* ini.



Pesan dari Direktur Pelaksana



Setiap tahun membawa harapan dan tantangan baru kepada negara-negara anggota IMF. Tidak terkecuali periode Mei 2016 dan April 2017, yang merupakan tahun fiskal 2017 kita.

Setelah beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang mengecewakan, ekonomi global mulai membangun momentum. Negara-negara maju, negara-negara emerging market, dan beberapa negara berkembang berprestasi rendah memperoleh manfaat dari siklus yang membaik tersebut. Lebih penting dari itu, tingkat partisipasi angkatan kerja telah kembali tumbuh di berbagai negara.

Namun, di balik berita menggembirakan ini, tersimpan ketidakpastian yang mendalam mengenai masa depan pasca perang tatanan ekonomi dan keuangan global. Ketidakpastian tersebut mencerminkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi IMF dan anggota-anggotanya selama beberapa tahun ke depan.

Tantangan pertama yang kita hadapi adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut. Negara-negara anggota IMF terus mendukung pendekatan tiga cabang sebagaimana yang saya uraikan dalam *Laporan Tahunan 2016* lalu—kombinasi yang spesifik untuk setiap negara berupa dukungan keuangan, kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan, dan reformasi struktural yang dapat memberikan dorongan penting bagi perekonomian dunia. Pendekatan ini menciptakan pengaruh yang signifikan dalam upaya membangun ketahanan terhadap kerentanan yang selama ini menjadi keprihatinan para anggota kita.

Namun itu baru satu persoalan penting. Tahun lalu juga menunjukkan adanya berbagai tantangan yang semakin nyata sejak krisis keuangan global 2008 dan membutuhkan perhatian yang lebih besar—keprihatinan yang berakar pada hilangnya lapangan kerja dan perubahan drastis dalam era perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial yang pesat ini. Hal ini paling jelas terlihat pada kekhawatiran akan meningkatnya kesenjangan (inequality).

Kesenjangan memiliki implikasi terhadap semua negara, dan di banyak negara keadaan semakin diperburuk oleh kinerja yang lebih lemah dibandingkan dengan tren sebelum krisis. Maka penting bagi masyarakat internasional untuk melakukan upaya terpadu agar pertumbuhan lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif. IMF sangat berkomitmen untuk menjalankan perannya dalam membangun ekonomi global yang memberi manfaat bagi semua orang—melalui saran kebijakan, berbagi pengetahuan, dan dukungan keuangan. Ini termasuk upaya penting terkait masalah ketidaksetaraan gender.

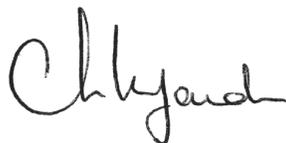
Masalah inti di balik tren pertumbuhan yang lebih lemah adalah penurunan produktivitas yang cukup terasa di banyak negara yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab tersebut meliputi penuaan berbagai negara—termasuk di beberapa negara emerging market, menurunnya manfaat dari revolusi teknologi informasi, dan pertumbuhan perdagangan yang melambat.

Upaya kita berkenaan dengan berbagai tantangan tersebut— yaitu perdagangan melambat, penurunan produktivitas, ketidaksetaraan gender, dan pertumbuhan inklusif—menjadi fokus utama dari Laporan Tahunan ini, sebagaimana akan diuraikan pada bagian Sorotan.

Tentu terdapat tantangan-tantangan lain. Bagi negara-negara emerging market, kami perlu memberikan saran substantif terkait pembiayaan dan pengelolaan investasi infrastruktur dan membangun kerangka fiskal untuk mendukung sistem kesehatan dan pendidikan yang kuat—kesemuanya ini penting bagi keberlanjutan keberhasilan ekonomi mereka. Bagi beberapa negara berpenghasilan rendah, hal ini berarti harus memastikan bahwa mereka dapat mengatasi dampak penurunan harga komoditas guna menjaga kemajuan pesat dalam dua dekade terakhir yang telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Bagi negara-negara di seluruh dunia, ini juga berarti memberi perhatian pada isu-isu penting seperti perubahan iklim dan korupsi yang memengaruhi perkembangan ekonomi mereka semua.

Mengingat rentang persoalan mendesak yang dihadapi negara anggota IMF, topik-topik yang dibahas Dewan Eksekutif IMF tahun lalu—dan, sebagai kelanjutannya, dalam Laporan Tahunan ini—adalah sangat penting, meliputi memperkuat jejaring pengaman keuangan global, memfokuskan pada pengawasan masalah makro-keuangan, menganalisis ruang fiskal, dan memperdalam upaya kami dalam pengembangan kapasitas.

Semua pekerjaan ini berada di bawah sebuah payung komitmen untuk kerja sama dan integrasi internasional yang telah diperbarui. Kesejahteraan ekonomi dunia dan keluarga bangsa-bangsa bergantung pada kesediaan yang kuat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan yang kita hadapi dengan memperkuat kembali stabilitas keuangan, mengurangi ketidakseimbangan global, dan menyediakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi semua.



APA YANG KAMI LAKUKAN

IMF Memiliki Tiga Peran Utama

Pengawasan Ekonomi



pemeriksaan kesehatan 135 negara

IMF mengawasi sistem keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan 189 negara anggotanya. Sebagai bagian dari proses pengawasan ini, yang berlangsung baik di tingkat global maupun di masing-masing negara, IMF menyoroti risiko yang mungkin timbul terhadap stabilitas dan memberikan saran penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Pinjaman



\$134,7 milyar kepada 15 negara, plus \$1,5 milyar pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga bagi 15 anggota negara berkembang berpenghasilan rendah

IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota yang sedang atau berpotensi mengalami masalah neraca pembayaran untuk membantu mereka membangun kembali cadangan internasionalnya, menstabilkan mata uang mereka, kelanjutan membiayai impor, dan memulihkan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, sambil pada saat bersamaan mengoreksi masalah mendasarnya.

Pengembangan Kapasitas



\$267 juta untuk berbagi pengetahuan, saran ahli, dan pelatihan

IMF bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk memodernisasi kebijakan dan institusi ekonomi mereka, dan melatih orang-orangnya. Hal ini membantu negara-negara memperkuat ekonomi mereka, meningkatkan pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja.

Bagaimana Memicu Kembali Pertum- buhan Global

Kegiatan IMF pada TA2017 fokus pada isu-isu global yang mendesak:

Perdagangan, dampak positifnya pada pertumbuhan dan bagi mereka yang tertinggal

Produktivitas, yang tingkat pertumbuhannya yang rendah telah berkontribusi pada stagnannya pendapatan

Pertumbuhan Inklusif, kebijakan untuk mengatasi kesenjangan yang semakin meningkat, terutama akibat perubahan teknologi

Kesetaraan Gender, agar ekonomi global dapat mewujudkan potensinya

Pengelolaan Utang, untuk membantu negara-negara menyesuaikan diri dengan penurunan pendapatan dari komoditas





Tantangan Perdagangan Dunia

Perdagangan telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan global, yang membantu menghasilkan kemajuan dalam hal produktivitas dan standar hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, pertumbuhan perdagangan—disertai produktivitas dan pendapatan—telah melambat. Tren ini sebagian mencerminkan, dan telah berkontribusi pada, melemahnya pertumbuhan ekonomi setelah krisis keuangan global tahun 2008.

Terlepas dari segala manfaatnya, perdagangan juga telah memberi dampak negatif pada berbagai kelompok pekerja dan masyarakat, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai dampak buruk ini, yang juga mencerminkan dampak inovasi teknologi, semakin meningkat oleh pertumbuhan yang lebih lambat, dan reaksi balik yang timbul telah melemahkan dukungan bagi integrasi ekonomi global.

Pada pertemuan puncak forum keuangan dan ekonomi Group of Twenty (G20) di Tiongkok tahun 2016, para pemimpin menyerukan kebijakan domestik yang memungkinkan manfaat perdagangan dapat dinikmati secara lebih luas.

Makalah yang disusun bersama oleh IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk pertemuan Sherpa G20 pada bulan Maret 2017 di Jerman membahas berbagai kebijakan yang dapat merespons seruan ini.

Dalam pernyataan resmi bulan April 2017, Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMF mengakui bahwa “periode pertumbuhan rendah yang berkepanjangan telah menimbulkan keprihatinan terhadap mereka yang selama ini tertinggal,” dan menyatakan bahwa “penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi global dan kemajuan teknologi.” Staf IMF semakin fokus pada dampak perdagangan terhadap outcome pasar tenaga kerja.

RINGKASAN MAKALAH STAF

Menjadikan Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan bagi Semua: Mengapa Perdagangan dan Kebijakan Perlu Memfasilitasi Penyesuaian

Integrasi perdagangan yang meningkat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang di penghujung abad ke-20.

Namun sejak awal tahun 2000-an, laju pertumbuhan perdagangan, produktivitas, dan pendapatan telah melambat, yang membuat banyak orang tertinggal, terutama di negara-negara maju.

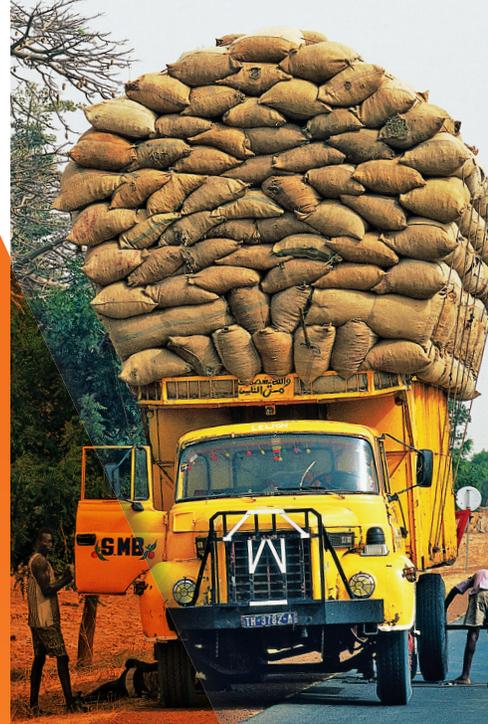
Dengan kebijakan yang tepat, negara-negara dapat menarik manfaat dari perdagangan, mengangkat mereka yang tertinggal, dan memperkuat fleksibilitas dan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Disiapkan oleh IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)



Perdagangan Terkait Erat dengan Pertumbuhan...

Dari tahun 1960 sampai krisis keuangan global 2008, perdagangan barang dan jasa tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sekitar 6 persen—kira-kira dua kali tingkat pertumbuhan PDB (*Gambar 1.1*). Ekspansi ini didukung oleh penurunan biaya perdagangan, termasuk tarif dan teknologi, dan menyebabkan munculnya rantai pasok global yang mendorong kemajuan di bidang manufaktur dan meningkatnya produktivitas. Di seluruh dunia, meningkatnya standar hidup yang menyertai perdagangan mendukung pandangan bahwa perdagangan merupakan penggerak utama pertumbuhan. Namun belakangan ini, perdagangan telah melambat, yang sebagian besar mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi—khususnya, investasi—seperti yang didokumentasikan dalam Bab 2 buku *World Economic Outlook 2016*.



...Namun Keraguan akan Manfaat Perdagangan Semakin Meningkat...

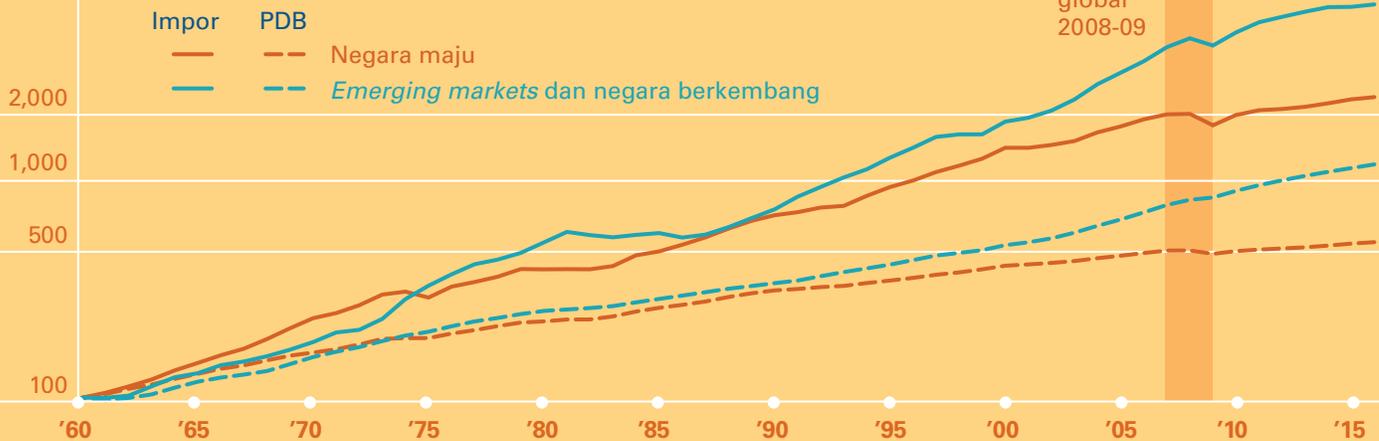
Kekhawatiran akan dampak perdagangan semakin meningkat di antara beberapa negara maju. Kecenderungan ini tercermin dalam survei opini publik dan hasil beberapa pemilihan umum. Pandangan terhadap manfaat perdagangan pada umumnya lebih baik di negara-negara emerging market dan negara berkembang.

Emerging markets berharap pertumbuhan yang lebih

Pertumbuhan perdagangan dan ekonomi melambat secara global sejak tahun 2008, namun negara berkembang dan emerging market mengalami kenaikan PDB dan impor lebih besar daripada negara-negara maju.

Dari tahun 1960 sampai krisis keuangan global 2008, perdagangan barang dan jasa tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sekitar dua kali tingkat pertumbuhan PDB.

Gambar 1.1
Perdagangan riil dan pertumbuhan PDB riil, 1960-2016
(Indeks, 1960 = 100, skala logaritmik)



Sumber: Prakiraan staf IMF.

Produktivitas Melemah

Pertumbuhan produktivitas melambat tajam di seluruh dunia menyusul krisis keuangan global (*Gambar 1.2*). Tren ini turut berkontribusi terhadap stagnasi pendapatan di banyak negara maju dan telah memperkuat reaksi berlawanan yang bersifat politis terhadap globalisasi.

Pola ini terlihat pada produktivitas tenaga kerja (output per pekerja) serta produktivitas dari total faktor, yang mengukur keseluruhan efisiensi perekonomian dalam penggunaan tenaga kerja, modal, dan elemen-elemen seperti teknologi. Jika tren ini berlanjut, ia akan mengancam kemajuan dalam meningkatkan standar kehidupan global, mengelola utang publik dan swasta, dan memastikan kelangsungan sistem perlindungan sosial. Menurunnya pertumbuhan produktivitas juga dapat memengaruhi kemampuan pembuat kebijakan dalam merespon guncangan ekonomi masa depan.

Makalah IMF bertajuk “*Gone with Headwinds: Global Productivity*” (“Terbawa Angin Haluan: Produktivitas Global”), yang membahas persoalan seputar produktivitas, diterbitkan pada

bulan April 2017. Persoalan-persoalan ini juga menjadi topik sebuah artikel dalam *Finance & Development* edisi Maret 2017.

Terdapat berbagai alasan struktural dan alasan yang terkait krisis atas perlambatan tersebut. Penyebab struktural mencakup memudarnya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, melemahnya upaya reformasi pasar ketenagakerjaan dan produk, kekurangan dan ketidaksesuaian keterampilan, dan faktor-faktor demografis seperti populasi yang menua. Selain itu, kelanjutan dampak krisis global masih terus dirasakan—lemahnya neraca-neraca perusahaan, kondisi kredit yang ketat di beberapa negara, *pelemahan investasi*, permintaan yang melemah, dan ketidakpastian kebijakan.

Perlambatan perdagangan global merupakan hambatan jangka panjang lainnya bagi produktivitas: perdagangan sejak tahun 2012 hampir tidak mengikuti laju PDB global. Ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas di masa depan—bahkan dengan tidak memperhitungkan kemungkinan pembatasan perdagangan.

RINGKASAN MAKALAH STAF

Gone with Headwinds: Global Productivity (Terbawa Angin Haluan: Produktivitas Global)

Pertumbuhan produktivitas – sebagai pendorong utama standar hidup – sudah mengalami penurunan di negara-negara maju sebelum krisis keuangan global mendorongnya turun secara tajam.

Hambatan struktural mencakup melemahnya dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang antara lain mencerminkan semakin menuanya tenaga kerja, memperlambatnya perdagangan global, dan melemahnya akumulasi modal sumber daya manusia.

Untuk menghidupkan kembali pertumbuhan produktivitas, dampak peninggalan dari krisis perlu ditangani dalam jangka pendek sementara terus mendesak reformasi struktural untuk mengatasi hambatan jangka panjang.

Disusun oleh Gustavo Adler, Romain Duval, Davide Furceri, Sinem Kiliç Çelik, Ksenia Koloskova, dan Marcos Poplawski-Ribeiro



Bagaimana Meningkatkan Produktivitas

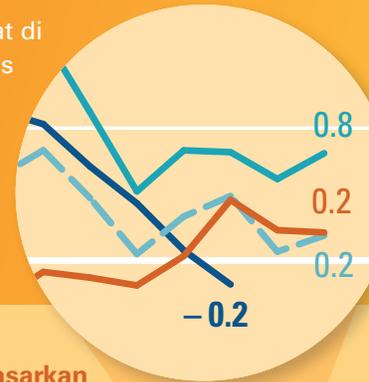
Untuk mengatasi masalah yang berkontribusi terhadap menurunnya pertumbuhan produktivitas, para pembuat kebijakan perlu fokus pada penguatan inovasi dan pendidikan, peningkatan reformasi struktural, dan terus menuai keuntungan dari perdagangan terbuka dan migrasi, sambil menerapkan kebijakan yang mendorong inklusivitas. Tapi karena sebagian besar perlambatan tersebut mencerminkan sisa luka krisis keuangan global, tindakan yang diambil harus ditargetkan pada dampak peninggalan krisis dimaksud.

Di antara kebijakan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- Tingkatkan permintaan pada titik yang masih lemah, terutama di bidang investasi, melalui proyek investasi pemerintah yang dipilih secara hati-hati dan dengan menghilangkan hambatan bagi investasi swasta. Ini akan mendukung akumulasi modal dan penerapan teknologi baru
- Restrukturisasi utang perusahaan dan perkuat neraca perbankan untuk memudahkan akses terhadap kredit dan merangsang investasi pada modal fisik maupun tidak berwujud. Produktivitas agregat juga akan mendapatkan manfaat—khususnya di Eropa, di mana perbaikan neraca lebih lambat daripada di Amerika Serikat. Restrukturisasi perusahaan dan pengawasan perbankan yang lebih baik juga akan memperbaiki alokasi modal
- Berikan sinyal yang jelas tentang kebijakan ekonomi masa depan, terutama kebijakan fiskal, regulasi, dan perdagangan. Ini akan mendukung investasi

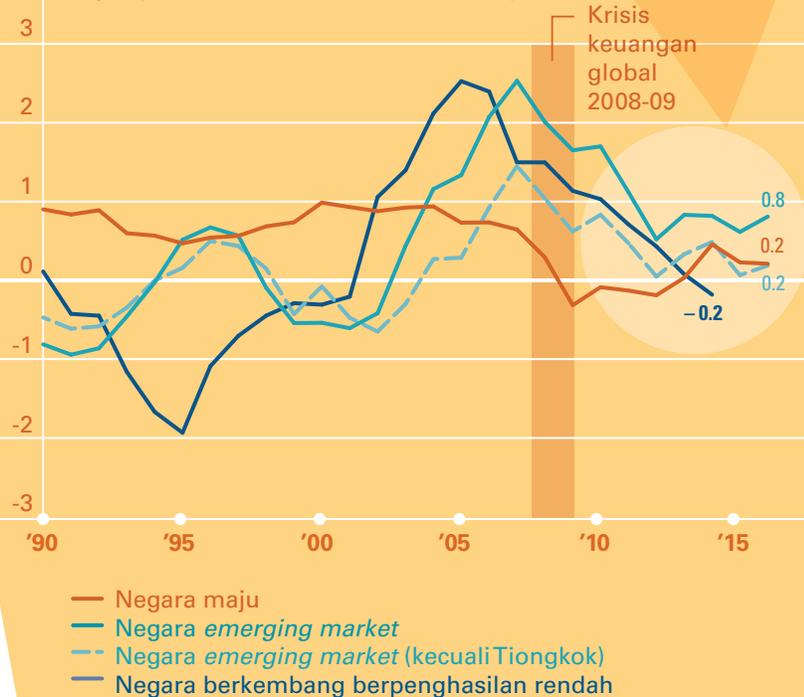
Pertumbuhan produktivitas di seluruh dunia telah melambat secara signifikan sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Pertumbuhan produktivitas telah melambat di negara-negara maju bahkan sebelum krisis menurunkannya secara tajam. Penyebab struktural dan faktor demografis juga berkontribusi pada kecenderungan tersebut.



Gambar 1.2
Pertumbuhan produktivitas berdasarkan kelompok negara, 1990-2016

(Tingkat pertumbuhan rata-rata lima tahunan; persen)



Sumber: Penn World Trade Table 9.0; IMF *World Economic Outlook*; dan perhitungan staf IMF.

Catatan: Rata-rata kelompok dibobot menggunakan PDB pada paritas daya beli.

Mendorong Pertumbuhan Inklusif

Kekhawatiran terhadap kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan inklusif telah muncul sebagai isu dari kepentingan global (Gambar 1.3). Selama 30 tahun terakhir, kesenjangan telah meningkat di banyak negara, sebagian besar karena perubahan teknologi. Pemerintah di seluruh dunia sekarang mencurahkan perhatian dan sumber daya pada tantangan membuat pertumbuhan lebih inklusif.

Penelitian IMF di bidang ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesenjangan menimbulkan risiko terhadap ketahanan pertumbuhan ekonomi, bahwa desain kebijakan pemerintah berdampak pada distribusi pendapatan, dan bahwa pemerintah juga dapat membantu mengatasi situasi tersebut. Sebuah makalah IMF yang dirilis pada bulan Januari 2017 memperluas penelitian tersebut pada dampak kebijakan makro-struktural di negara-negara berkembang berpenghasilan rendah (Gambar 1.4). Penelitian lain fokus pada implikasi defisit anggaran, liberalisasi pasar tenaga kerja, dan pergerakan modal lintas batas.

IMF sekarang mengalihkan kerjanya ke arah cara-cara konkret di mana pemahaman yang lebih dalam tentang akar kesenjangan ini dapat diwujudkan ke dalam kebijakan yang mendorong pertumbuhan

RINGKASAN MAKALAH STAF

Kebijakan Struktural Ekonomi Makro dan Kesenjangan Pendapatan di Negara-negara Berkembang Berpenghasilan Rendah

Terlepas dari pertumbuhan kuat selama dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan tetap tinggi di banyak negara berkembang berpenghasilan rendah (low-income developing countries – LIDC), yang dapat mengganggu laju pertumbuhan dan keberlangsungan pertumbuhan di masa depan dan stabilitas ekonomi makro.

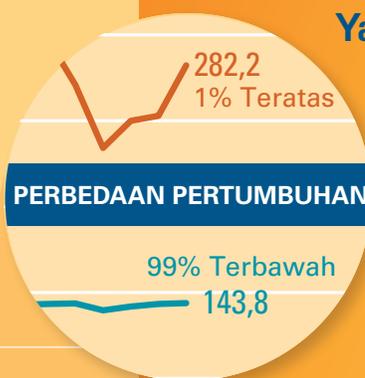
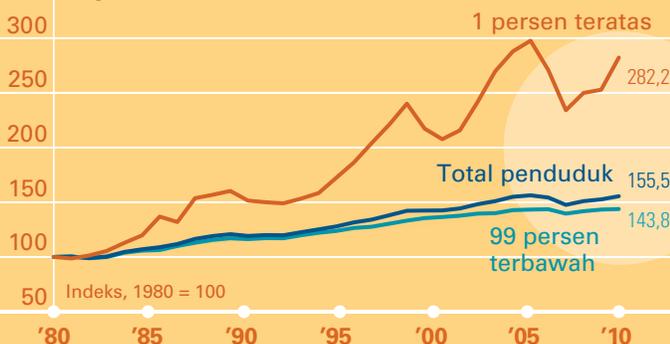
Ciri-ciri seperti tingkat informalitas yang tinggi, terbatasnya mobilitas tenaga kerja secara geografis atau lintas sektoral, perbedaan produktivitas lintas sektoral yang besar, kurangnya akses terhadap keuangan, dan tingkat infrastruktur yang rendah

dapat membuat pilihan pertumbuhan atau kesenjangan menjadi persoalan yang amat menantang khususnya bagi negara-negara LIDC.

Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan seperti reformasi fiskal (aturan kebijakan perpajakan, investasi infrastruktur publik yang lebih tinggi), reformasi sektor keuangan, dan reformasi sektor pertanian dapat memiliki dampak penting terhadap pemerataan bagi negara-negara LIDC. Intervensi kebijakan yang terarah, yang diterapkan bersamaan dengan reformasi yang pro-pertumbuhan, dapat digunakan untuk membatasi efek berlawanan terhadap pemerataan dari langkah-langkah reformasi dimaksud.

Disiapkan oleh Stefania Fabrizio, Davide Furceri, Rodrigo Garcia-Verdu, Bin Grace Li, Sandra V. Lizarazo, Marina Mendes Tavares, Futoshi Narita, dan Adrian Peralta-Alva

Gambar 1.3
Negara ekonomi maju, pendapatan pasar riil per kapita, 1980-2012



Yang kaya semakin kaya

Di negara-negara maju, penghasilan dari 1 persen populasi teratas telah tumbuh tiga kali lebih cepat daripada populasi lainnya.

Sumber: World Wealth & Income Database; IMF, *World Economic Outlook*; dan perhitungan staf IMF.
Catatan: Sampelnya meliputi Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. *Market income* berarti pendapatan individu sebelum pajak dan transfer.

Sekilas tentang Kesenjangan di Negara-Negara Rintisan

Bolivia Di negara yang pernah memiliki salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di Amerika Latin, harga komoditas yang tinggi dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah mendorong perbaikan yang signifikan. Ketika harga komoditas turun, Bolivia berusaha mempertahankan kemajuan tersebut. Konsultasi IMF tahun 2015 dan 2016 dengan Bolivia berfokus pada kesenjangan, dengan memanfaatkan studi pendapatan rumah tangga. Staf IMF mengembangkan sebuah model yang mensimulasikan evolusi dari kesenjangan dan menguji kebijakan guna menjaga kemajuan Bolivia. Konsultasi 2016 menetapkan bahwa respon kebijakan yang paling efektif adalah menjaga investasi infrastruktur, bantuan tunai yang terarah yang lebih baik, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan.



Ethiopia Sektor keuangan Ethiopia relatif tertinggal, dengan sekitar dua pertiga dari total kredit perbankan disalurkan ke perusahaan pemerintah. Suku bunga deposito secara riil adalah negatif. Konsultasi Artikel IV Tahun 2016 menguraikan langkah-langkah yang diambil otoritas pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Analisis lainnya yang terpisah membahas reformasi untuk mengurangi pemberian pinjaman ke sektor publik dan meningkatkan suku bunga deposito. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tersebut kemungkinan akan meningkatkan kesenjangan dengan cara menguntungkan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki akses keuangan dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja.



Malawi Program subsidi pupuk Malawi untuk petani kecil telah menjadi tonggak utama upaya pengurangan kemiskinan di negara ini. Namun program ini menjadi semakin mahal dan sarat penyalahgunaan – tanpa meningkatkan produksi jagung atau mengurangi kemiskinan secara signifikan – sebagian karena kekeringan yang parah. IMF, berkolaborasi dengan Bank Dunia, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengalihkan sumber daya subsidi menjadi transfer tunai bagi masyarakat miskin perdesaan. Sementara itu, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan pertanian dan irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kecil dan memperkuat daya tahan terhadap perubahan cuaca. Upaya ini, dikombinasikan dengan transfer tunai, diharapkan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan.



Pertumbuhan tidak membantu semua

Perekonomian sudah tumbuh dan kemiskinan sudah menurun, namun ketimpangan tetap tinggi di negara berpenghasilan rendah.

Sumber: IMF *World Economic Outlook*; PovcalNet; Database Sosio-Ekonomi Bank Dunia untuk Amerika Latin dan Karibia; World Bank World Development Indicators; dan perhitungan staf IMF.

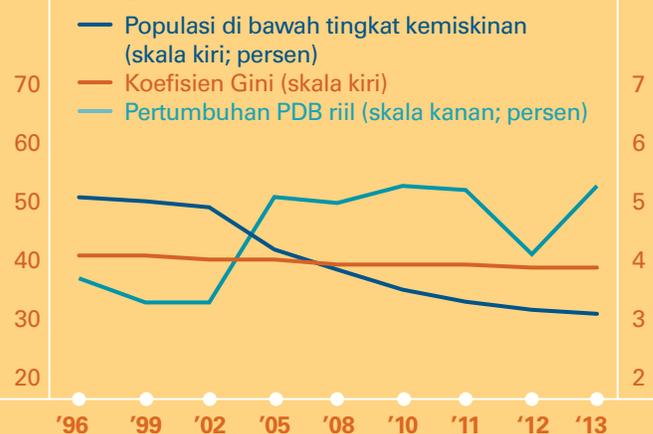
Catatan: Koefisien Gini mengukur distribusi pendapatan penduduk suatu negara. Semakin tinggi indeks, semakin besar ketimpangan. Perhitungan Gini didasarkan pada 40 negara berpenghasilan rendah.



inklusif—dengan fokus pada cara seimbang untuk pemajakan dan pembelanjaan. Keputusan di bidang ini perlu dilakukan oleh otoritas negara.

Selama dua tahun terakhir, staf IMF telah bekerja dengan sekelompok negara rintisan yang tersebar di seluruh wilayah dan kelompok pendapatan untuk membawa isu kesenjangan dan respon kebijakan ke dalam diskusi selama pemeriksaan kesehatan tahunan IMF terhadap negara-negara anggotanya. Persoalan-persoalan tersebut sekarang ditampilkan dalam laporan yang disiapkan sebagai bagian dari dokumen konsultasi Artikel IV.

Gambar 1.4
Negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, pertumbuhan dan ketimpangan, 1996–2013



Kerja Terkait Gender

“Kesetaraan gender lebih dari sekedar persoalan moral; ini adalah persoalan ekonomi yang penting. Agar ekonomi global dapat meraih potensinya, kita perlu menciptakan kondisi di mana semua perempuan dapat meraih potensi mereka.”

—Konselor Ekonomi IMF Maurice Obstfeld, 23 Maret 2017

IMF telah dengan cepat mengembangkan kerjanya terkait persoalan gender dalam beberapa tahun terakhir melalui berbagai analisis kebijakan dan saran, penelitian, dan berbagi pengetahuan. Ragam kegiatan ini diperdalam selama TA2017. Direktur Pelaksana Christine Lagarde memberikan kerangka untuk komitmen yang dibuat pada Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” (*Women’s Economic Empowerment*) pada bulan September 2016. Komitmen tersebut mencakup:

- Saran kebijakan dan analisis untuk mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan
- Pekerjaan terkait kesenjangan data gender dengan fokus pada inklusi keuangan
- Penganggaran gender
- Penelitian tentang dampak diskriminatif dari pembatasan-pembatasan oleh hukum
- Penelitian tentang hubungan antara ketidaksetaraan gender dan pertumbuhan serta dampak kebijakan terhadap ketidaksetaraan gender

Apa itu Penganggaran Gender?

Penganggaran gender merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan kebijakan fiskal dan instrumen pengelolaan keuangan publik untuk mendorong kesetaraan gender dan pembangunan. Ini bukan hanya sekedar mendanai inisiatif kesetaraan gender yang eksplisit. Melainkan juga berkenaan dengan analisis kebijakan fiskal dan keputusan penganggaran guna memahami dampaknya—baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak—terhadap kesetaraan gender, dan menggunakan informasi ini untuk merancang kebijakan kesetaraan gender yang efektif. Beberapa negara fokus pada alokasi belanja atau struktur kebijakan fiskal, sementara yang lainnya pada perubahan administratif terhadap perencanaan dan pengawasan anggaran. Upaya-upaya yang paling berhasil sudah mencakup kedua area tersebut. IMF kini menyediakan basis data online mengenai upaya penganggaran gender global dan dua indeks kesetaraan gender.

Perkembangan Kerja Terkait Gender pada TA2017

Sasaran kesetaraan gender dalam dialog kebijakan dengan negara anggota: Dua puluh tiga studi rintisan di level negara dan regional telah selesai, dan empat lainnya sedang berjalan. Pekerjaan ini terutama fokus pada peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan mengukur kerugian ekonomi makro dari ketidaksetaraan gender. Di negara-negara emerging market dan negara berkembang, rekomendasi menekankan peningkatan akses terhadap keuangan, pendidikan dan pelatihan, serta infrastruktur dasar seperti listrik dan sanitasi; di negara maju, rekomendasi yang diberikan menekankan pada perubahan sistem perpajakan agar menghindari “pemberian pinalti” bagi pencari nafkah sekunder dalam keluarga dan akses terhadap pengasuhan anak berkualitas tinggi dan terjangkau.

Pinjaman IMF: Pertimbangan gender sekarang sudah dimasukkan dalam berbagai program. Di Mesir dan Nigeria, misalnya, berbagai program sudah memasukkan tujuan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan melalui peningkatan ketersediaan tempat pengasuhan anak untuk publik (Mesir) dan pengembangan strategi gender (Nigeria).



Penganggaran gender: IMF menerbitkan makalah “*Gender Budgeting in G7 Countries*” (Penganggaran Gender di Negara-negara G7”) pada awal TA2018 untuk Kepemimpinan Italia di Kelompok Tujuh (G7) untuk mengisi diskusi G7 tentang kesetaraan gender. IMF sekarang menyediakan basis data online mengenai upaya penganggaran gender global dan dua indeks kesetaraan gender. Pekerjaan terkait penganggaran gender akan berlanjut, termasuk sebagai bagian dari bantuan teknis di bidang pengelolaan keuangan publik.

Inklusi keuangan: IMF melakukan studi rintisan tentang akses perempuan terhadap perbankan dan layanan keuangan lainnya di 28 negara. Hasilnya digunakan untuk menilai bagaimana mengurangi kesenjangan data, dan berdasarkan itu sebuah perangkat dikembangkan.

Publikasi: Pada bulan Februari 2017, IMF menerbitkan sebuah buku berjudul *Women, Work, and Economic Growth: Leveling the Playing Field* (Perempuan, Bekerja, dan Pertumbuhan Ekonomi: Menyetarakan Tingkat Kompetensi)

Konferensi: IMF menyelenggarakan dua konferensi terkait isu gender: sebuah acara satu hari mengenai Kebijakan Fiskal dan Kesetaraan Gender, dan sebuah konferensi tiga hari tentang Gender dan Ekonomi makro. Lebih dari 200 peserta hadir di setiap acara. Konferensi Gender dan Ekonomi Makro didahului oleh acara

pembelajaran antar-rekan bagi para peneliti dan praktisi dari Afrika sub-Sahara.

Pengembangan kapasitas: Bantuan teknis IMF mengenai penganggaran gender menjadi semakin penting. Sebagai contoh misalnya di Kamboja (pelaporan keuangan), di Ukraina (kerangka penganggaran jangka menengah), dan di Austria (evaluasi transparansi fiskal).

Gender dan Pertumbuhan

Studi IMF telah menunjukkan keuntungan ekonomi makro yang signifikan ketika perempuan dapat berpartisipasi lebih optimal di pasar tenaga kerja dan diberi kesempatan yang sama (hak hukum, pendidikan, kesehatan, akses terhadap keuangan [Gambar 1.5]). Meskipun ada kemajuan yang signifikan, partisipasi angkatan kerja perempuan tetap lebih rendah daripada laki-laki di sebagian besar negara maju, negara *emerging market*, dan negara berkembang. Kesenjangan upah masih tinggi, dan representasi perempuan masih terlalu banyak di sektor informal dan di kalangan miskin. Di 90 persen negara, pembatasan hukum menghambat perempuan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sepenuhnya. Meskipun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah merupakan sasaran pembangunan yang penting, partisipasi ekonomi perempuan juga penting bagi pertumbuhan, output dan ekspor, diversifikasi, dan distribusi pendapatan yang lebih setara.

RINGKASAN MAKALAH STAF

Perempuan, Pekerjaan, dan Perekonomian: Keuntungan Ekonomi Makro dari Kesetaraan Gender

Perempuan merupakan lebih dari separuh penduduk dunia, namun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi yang terukur, pertumbuhan, dan kesejahteraan masih jauh di bawah potensinya, dengan konsekuensi ekonomi makro yang serius.

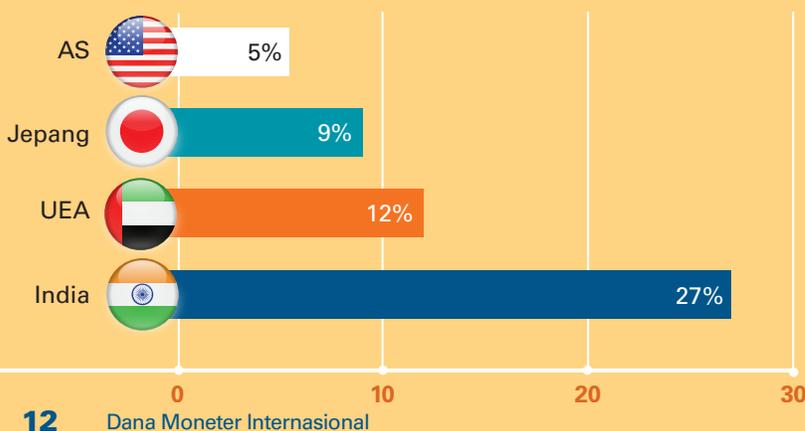
Di negara-negara yang penduduknya semakin menua, partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi dapat mendorong pertumbuhan dengan mengatasi dampak dari angkatan kerja yang menyusut. Di negara-negara berkembang, kesempatan yang lebih baik bagi perempuan juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas, misalnya, melalui jumlah anak perempuan bersekolah yang lebih tinggi.

Menerapkan kebijakan yang menghilangkan distorsi pasar tenaga kerja dan menciptakan arena yang setara bagi semua akan memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi lebih nyata.

Disiapkan oleh Katrin Elborgh-Woytek, Monique Newiak, Kalpana Kochhar, Stefania Fabrizio, Kangni Kpodar, Philippe Wingender, Benedict Clements, dan Gerd Schwartz

Gambar 1.5
Partisipasi angkatan kerja perempuan dan PDB

Berapa kenaikan PDB suatu negara jika partisipasi angkatan kerja perempuan ditingkatkan agar setara dengan partisipasi laki-laki?



Kesetaraan gender akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Negara-negara pada semua tingkat pendapatan akan merasakan kenaikan PDB yang signifikan jika partisipasi angkatan kerja perempuan ditingkatkan agar setara dengan partisipasi laki-laki.

Sumber: Perkiraan staf IMF.
Catatan: AS: Amerika Serikat; UEA: Uni Emirat Arab.



Pengembangan Kapasitas untuk Pengelolaan Utang

Arab Saudi Membangun Keahlian Pengelolaan Utang

Setelah penurunan harga minyak dunia yang tajam, pemerintah Arab Saudi menetapkan rencana untuk transformasi ekonomi negara yang berani di bawah



Visi 2030 dan Program Transformasi Nasional. Rencana-rencana tersebut mencakup diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja sektor swasta, mengambil langkah bertahap untuk menyeimbangkan anggaran, dan memperkuat terus kemampuan investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu memperdalam likuiditas di pasar modal dan memperkuat peran pasar utang.

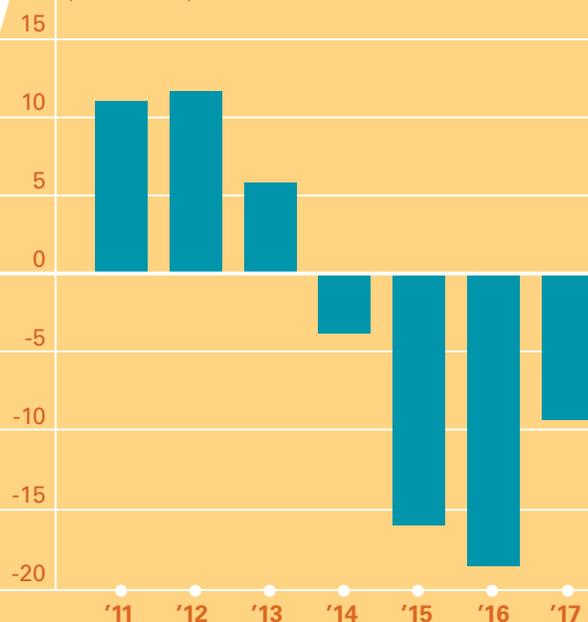
Hingga baru-baru ini, Arab Saudi sebagai produsen minyak belum pernah perlu untuk berhutang karena tidak menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan. Namun, penurunan penerimaan pendapatan akibat turunnya harga minyak telah mengakibatkan defisit fiskal (Gambar 1.6), meskipun harga minyak sudah cukup pulih. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah membuat perubahan kebijakan yang mendasar dan mengadopsi pendekatan dua cabang untuk menjaga stabilitas ekonomi makro: dengan memanfaatkan cadangan fiskalnya yang cukup besar dan meminjam uang dengan menerbitkan utang.

Mendirikan kantor pengelolaan utang merupakan langkah awal menuju pengembangan pasar modal utang. Pada tahun 2016, pemerintah Arab Saudi meminta IMF untuk membagi keahliannya dalam mendirikan kantor tersebut. Setelah menganalisis situasi pembiayaan dan menentukan bagaimana pembentukan kantor pengelolaan utang dapat memperbaiki manajemen ekonomi makro, IMF dan pemerintah Arab Saudi bekerja sama untuk melakukan hal-hal berikut:

Penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir ini berujung pada penurunan pendapatan.

Defisit fiskal yang ditimbulkan telah mendorong adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah.

Gambar 1.6
Arab Saudi, neraca fiskal, 2010–16
(Persen PDB)



Sumber: Otoritas negara; dan perhitungan staf IMF.



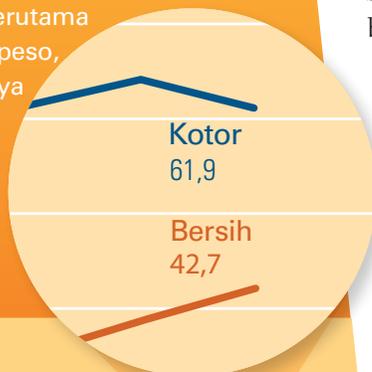


Gambar 1.8
Uruguay, komposisi
utang sektor
publik, 2015
(Persen)

Sumber: Banco Central del Uruguay;
Haver Analytics; perhitungan staf IMF
dan IMF, *World Economic Outlook*.

Unit pengelolaan utang Uruguay mengidentifikasi ketidakcocokan utama.

Utang kotor (gross debt) meningkat pada tahun 2015 terutama karena depresiasi peso, mengingat besarnya porsi utang dalam mata uang asing.



- Mendirikan kantor pengelolaan utang di bawah Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rerangka hukum, tata kelola, dan pengelolaan risiko untuk pengelolaan utang
- Mengembangkan strategi utang jangka menengah untuk menilai trade-off dari berbagai alternatif strategi utang
- Mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan pasar utang lokal

Kantor Pengelolaan Utang Arab Saudi mulai beroperasi pada bulan Oktober 2016. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan negara dengan kombinasi terbaik antara biaya dan risiko yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang, instrumen utang pemerintah secara bertahap akan teregister, terdaftar dan diperdagangkan di Tadawul, bursa saham Arab Saudi.

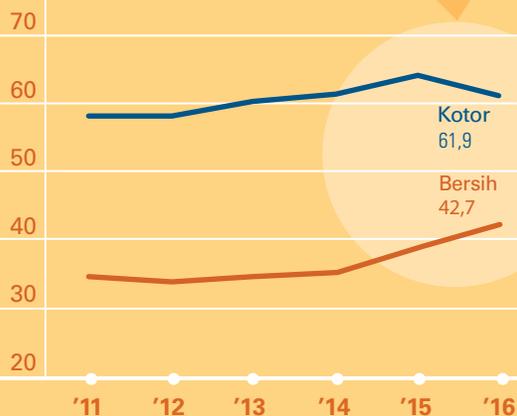
Bentuk kerja sama IMF dengan Arab Saudi dapat menjadi model yang berguna untuk berbagai negara pengekspor minyak atau komoditas lainnya yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis terhadap pengelolaan utang.

Manajemen Aset dan Kewajiban yang Inovatif dari Uruguay Mengurangi Risiko

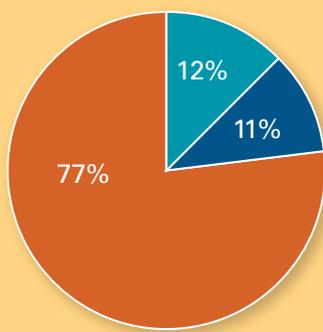
Perusahaan mengelola aset dan kewajiban konsolidatif mereka sebagai elemen inti dalam mengelola risiko pada neraca mereka. Tetapi banyak pemerintah, dengan beragam aset dan kewajiban—beberapa eksplisit dan beberapa implisit atau masih bersifat contingent—biasanya tidak menyusun neraca penuh atau bahkan laporan posisi keuangan mereka, karena analisis konvensional jarang dilakukan terhadap aset dan kewajiban pemerintah. Hal ini menjadikan penilaian risiko neraca pemerintah menjadi sulit.

Uruguay telah mengambil pendekatan inovatif terhadap tantangan ini. Unit pengelolaan utang Uruguay dan IMF bekerja sama untuk mempelajari secara lebih komprehensif pengelolaan utang pemerintah dalam konteks neraca

Gambar 1.7
Uruguay, utang sektor publik, 2011–16
(Persen PDB)



Sumber: Banco Central del Uruguay; Haver Analytics; IMF, *World Economic Outlook*; dan perhitungan staf IMF.

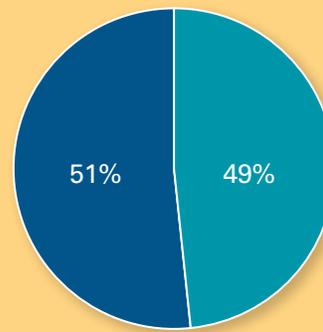
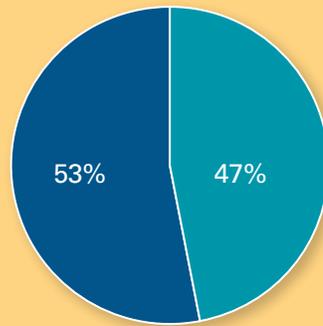


Jatuh Tempo

- 1 tahun
- 1-5 tahun
- 5+ tahun

Mata Uang

- Peso Uruguay
- Mata uang asing



Status Penduduk

- Penduduk
- Non-penduduk

sektor publik yang lebih luas, dan untuk menilai peran pasar obligasi domestik dalam mengelola potensi risiko portofolio publik. Pekerjaan ini, yang melibatkan review terhadap neraca di seluruh pemerintah, termasuk pemerintah pusat, Bank Sentral Uruguay, badan usaha milik negara besar, dan Bank Asuransi Negara (State Insurance Bank) (Gambar 1.7 dan 1.8), telah membantu mengidentifikasi ketidakcocokan (mismatches) yang penting serta kemungkinan perubahan kebijakan.

Sebagai contoh, kewajiban dalam dolar AS melebihi aset dolar AS, yang mengindikasikan bahwa negara tersebut harus menetapkan strategi untuk mengurangi utang dolar AS dengan semakin mengembangkan pasar obligasi dalam mata uang lokal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Uruguay harus melindungi risiko nilai tukar mata uang asing yang ada dengan menggunakan pasar berjangka secara lebih dalam. Hal ini akan memerlukan koordinasi lebih lanjut antara pengelolaan utang dan penerapan kebijakan moneter, serta konsolidasi berbagai jenis instrumen utang yang telah diterbitkan. Hal ini juga akan mensyaratkan perhatian terhadap indeksasi terkait inflasi dan terkait upah dalam konteks memapankan sistem pensiun, serta memperbaiki pengaturan custody dan settlement global.

Pemerintah Uruguay bertekad untuk mengurangi ketidakcocokan valuta asing dan meningkatkan ketahanan negara terhadap risiko valuta asing, sehingga memperkuat stabilitas keuangan. “Dengan berpikir tentang neraca konsolidasi negara,” kata Kepala Misi Bantuan Teknis IMF Michael Papaioannou, “pihak berwenang dapat memiliki pandangan komprehensif terhadap risiko neraca negara dan mungkin dapat melakukan lindung nilai terhadap dampak tertentu yang terkait melalui cara yang lebih efisien.”

“Dengan berpikir tentang neraca konsolidasi negara, pihak berwenang dapat memiliki pandangan komprehensif terhadap risiko neraca negara dan mungkin dapat melakukan lindung nilai terhadap dampak tertentu yang terkait melalui cara yang lebih efisien.”

— Kepala Misi Bantuan Teknis IMF
Michael Papaioannou



Pergeseran Ekonomi Tiongkok Memukul Eksportir Sub-Sahara Afrika

Tiongkok dan Afrika telah menjalin hubungan perekonomian yang erat selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan Tiongkok yang pesat telah mendorong peningkatan permintaan bahan mentah, sebagian di antaranya berasal dari Afrika. Perdagangan antara kedua kawasan telah mengalami peningkatan sebesar lebih 40 kali lipat selama kurun waktu yang sama. Proporsi ekspor Tiongkok ke Afrika melonjak dari 1.6 persen pada tahun 1995 menjadi 16.5 persen pada tahun 2015, dan proporsi impor dari Afrika meningkat dari 2.5 persen ke 23.2 persen (*Gambar 1.9*)

Roger Nord, salah satu penulis "A Rebalancing Act for China and Africa: The Effects of China's Rebalancing on Sub-Saharan Africa's Trade and Growth"

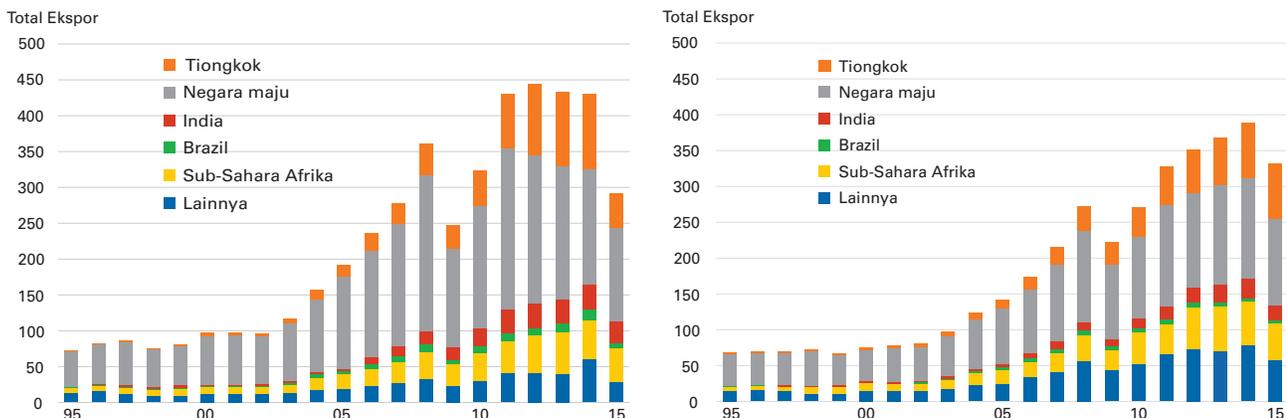
Namun **kini pertumbuhan Tiongkok mengalami perlambatan, dan penggerak pertumbuhannya bergeser dari investasi dan ekspor ke konsumsi domestik**, suatu proses yang disebut sebagai "mencapai keseimbangan baru (*rebalancing*).” Suatu analisa yang baru-baru ini dibuat oleh IMF menunjukkan bahwa pergeseran ini telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap eksportir berbagai komoditas, yang sebagian besar berada di Afrika: pada tahun 2015, nilai ekspor Afrika ke Tiongkok turun ke \$48 milyar dari \$105 milyar pada tahun 2014, telah memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang dan cadangan devisa. Pendapatan pemerintah yang turun tajam di negara-negara yang sarat komoditas (*commodity intensive countries*) telah memaksa mereka untuk mengurangi belanja negara, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan sosial yang sangat diperlukan. Penderitaan jangka pendek tersebut bersifat akut.

Meski demikian, masih ada kabar baik. Mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, **perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan Tiongkok telah memperluas penanaman modal langsung dan pinjamannya di Afrika**, terutama di negara-negara yang tidak sarat sumber daya, yang terus menikmati pertumbuhan yang tinggi. Dalam jangka menengah, investasi ini menawarkan peluang bagi sub-sahara Afrika untuk menjadi bagian dari rantai nilai global (*global value chain*), mendorong transformasi struktural yang sangat diperlukan benua tersebut.

"Setiap peristiwa ada hikmahnya," menurut Roger Nord, salah satu penulis laporan analisa IMF. "Sementara turunnya harga komoditas merugikan Afrika dalam jangka pendek, pergeseran Tiongkok yang menjadi lebih condong ke konsumsi menawarkan peluang bagi Afrika untuk mempercepat transformasi strukturalnya yang memang sangat diperlukan."

Gambar 1.9

Sub-Sahara Afrika, ekspor dan impor berdasar mitra, 1995–2015
(Milyar dollar AS)



Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistic*.

Keterlambatan Penyesuaian terhadap Penurunan Harga Komoditas Menghambat Pertumbuhan di Sub-Sahara Afrika

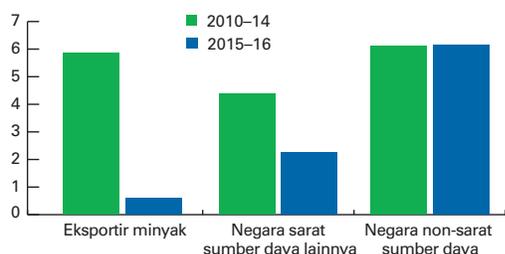
Mulai tahun 2011, dan menjadi semakin parah sejak pertengahan 2014, penurunan harga komoditas telah memberikan tekanan terhadap perekonomian 23 negara sub-Sahara Afrika, yang ekspornya secara signifikan bergantung pada komoditas. Di negara-negara tersebut, penurunan ekspor terus berlanjut dan berkurangnya penerimaan telah berakibat pada semakin memburuknya neraca perdagangan dan neraca fiskal, terutama bagi eksportir minyak bumi.

Sebagai akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang mulai terasa, cadangan devisa internasional berkurang, dan utang dan jatuh tempo kewajiban pemerintah mengalami peningkatan. **Pelambatan**

pertumbuhan di negara-negara yang sarat sumber daya menjadi semakin nyata sejak tahun 2014, dibandingkan dengan periode sebelumnya di mana pertumbuhan berlangsung cukup lama. Gambaran ini sangat kontras dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, yang mengalami momentum yang baik, karena mereka juga menikmati penguatan pertumbuhan dari tagihan impor energi yang lebih rendah (*Gambar 1.10*). Pertumbuhan untuk sub-Sahara Afrika secara keseluruhan mencapai 1.4 persen pada tahun 2016—kinerja terburuk dalam dua dekade lebih.

Gambar 1.10

Sub-Sahara Afrika, Pertumbuhan PDB, 2010-16
(Rata-rata; persen)



Sumber: IMF, database *World Economic Outlook*.

“Pemerintah di negara-negara sub-Sahara Afrika yang mengalami dampak terburuk telah mulai melakukan penyesuaian kebijakan, namun penyesuaian-penyesuaian tersebut masih lambat dan kurang memadai, menimbulkan ketidakpastian, menghambat investasi, dan menimbulkan risiko munculnya kesulitan yang semakin besar di masa mendatang,” menurut Pimpinan Divisi Departemen Afrika Céline Allard, yang mengoordinir persiapan Prospek Ekonomi Regional: *Sub-Sahara Afrika—Membangkitkan kembali Mesin Pertumbuhan untuk bulan April 2017* (*Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa—Restarting the Growth Engine*).

Dengan demikian, karena harga komoditas diperkirakan tetap rendah, negara-negara yang paling parah terkena dampaknya harus menyesuaikan diri segera jika mereka ingin mengembalikan stabilitas makroekonomi dan membangkitkan kembali pertumbuhan. **Mereka perlu memadukan konsolidasi fiskal dengan fleksibilitas nilai tukar mata uang jika memungkinkan.** Dan keseimbangan kembali ini akan bertahan hanya jika negara-negara tersebut pada saat yang sama mendorong adanya mobilisasi pendapatan domestik, mendorong diversifikasi, dan mengatasi kelemahan yang telah lama ada pada iklim usaha guna menarik investasi di sektor-sektor baru.

Anggota tim Prospek Ekonomi Regional: Sub-Sahara Afrika (dari kiri): Jackie Zhang, Nkunde Mwase, Haris Tsangarides, Jarek Wiczorek, Natasha Minges, Romain Bouis, Mustafa Yenice, Torsten Wezel, Maxwell Opoku-Afari, Monique Newiak, Céline Allard (tidak ada di gambar: Francisco Arizala, Paolo Cavallino, Jesus Gonzales-Garcia, Cleary Haines, Charlotte Vazquez)



Dampak Ekonomi Berbagai Konflik dan Krisis Pengungsi

Gaëlle Pierre, salah satu penulis “The Economic Impact of Conflicts and the Refugee Crisis in the Middle East and North Africa”

Berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang dramatis. Kajian IMF tentang dampak ekonomi dari konflik tersebut, yang dipublikasikan pada September 2016, melihat peran yang dimainkan oleh berbagai kebijakan perekonomian dalam konteks ini. Studi tersebut menemukan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan-kebijakan tersebut dapat membantu memitigasi sebagian dampak langsung dari konflik, dan dalam jangka panjang, kebijakan-kebijakan tersebut memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pemulihan yang sehat dan berkelanjutan, serta dalam mengurangi kemungkinan konflik berlangsung kembali.

Pada saat konflik tengah berlangsung, pembuatan kebijakan berhadapan dengan berbagai tantangan, tuntutan yang saling bertentangan dan berbagai kebutuhan yang mendesak (*Gambar 1.11*). Dihadapkan pada berbagai kondisi tersebut, tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang mungkin tampak kurang relevan. Meski demikian, **kegagalan dalam mempertahankan praktik kebijakan yang baik atau dalam menyeimbangkan dampak negatif konflik dapat menimbulkan konsekuensi berlawanan yang lebih dalam dan berlangsung lama** bagi perekonomian negara-negara yang mengalami konflik.

Berpikir melalui kebijakan ekonomi, meskipun sulit diterapkan mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk menangani konflik, dapat membantu menjaga sebagian stabilitas ekonomi. Selain itu untuk menangani kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, terdapat tiga prioritas: menjaga efektivitas lembaga-lembaga perekonomian, menentukan prioritas ruang anggaran (*budget space*) untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan menggunakan kebijakan moneter dan nilai tukar untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

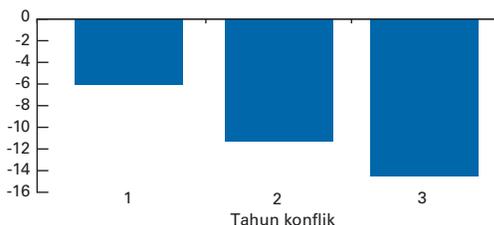
Pemulihan dari dampak konflik memerlukan waktu, bergantung pada berbagai faktor, di antaranya intensitas, jangka waktu, dan jenis konflik serta besaran kerusakan yang dialami oleh institusi-institusi tersebut. Misalnya, selama periode 1970–2014, negara-negara pasca konflik yang dalam rentang yang luas yang telah menjaga perdamaian setidaknya 10 tahun setelah konflik berakhir, rata-rata pertumbuhan tahunannya adalah 4.5 persen. Meski demikian, jika konflik di Suriah berakhir pada tahun 2015 dan negara tersebut tumbuh pada tingkatan tersebut, Suriah memerlukan waktu setidaknya 20 tahun hanya untuk kembali ke level PDB pra-konflik tahun 2010.

Saat berbagai negara mengalami transisi untuk keluar dari kebijakan ekonomi masa perang, **keberhasilan pembangunan kembali memerlukan institusi-institusi yang berfungsi dengan baik dan kerangka ekonomi makro yang kuat namun tetap fleksibel** agar dapat memandu jalannya rekonstruksi dan pemulihan, terutama dalam mengelola dukungan donor, menyerap aliran modal yang masuk, dan menjaga kemampuan membayar utang. Tantangan utama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah untuk mengelola populasi pengungsi yang besar dan merancang

kebijakan yang dapat mengakomodasi kembalinya pengungsi ke negara asal mereka atau menciptakan peluang-peluang di negara penampung untuk mengakomodasi pengungsi dan membawa mereka menuju kegiatan yang produktif. Hal ini berarti merancang kebijakan tidak hanya bagi pengungsi namun juga bagi masyarakat negara penampung, yang terkadang juga sering mengalami kesulitan.

Gambar 1.11

Timur Tengah dan Afrika Utara, perubahan PDB terkait konflik, 1970–2014 (Persen, kumulatif)



Sumber: Center for Systemic Peace; dan Perkiraan staf IMF.

Pelajaran dari pergolakan Arab Spring dan konflik-konflik yang mengikutinya menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh kawasan tersebut hendaknya **mempercepat laju reformasi pertumbuhan inklusif yang bertujuan mengurangi ketimpangan kesempatan (*inequality in opportunities*)**. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat tersebar secara lebih merata—yang juga merupakan suatu tantangan untuk berbagai kawasan di dunia lainnya.

Guna membantu memitigasi implikasi ekonomi dari konflik dan dampak lanjutan yang diakibatkannya, IMF memberikan saran kebijakan yang bersifat khusus untuk bidang-bidang sebagai berikut:

- membangun kerangka makro ekonomi yang kokoh
- menetapkan kebijakan moneter dan nilai tukar
- menentukan prioritas belanja pemerintah, termasuk untuk menjaga belanja sosial yang sangat penting, dan menjaga kemampuan pembayaran utang (*debt sustainability*)
- mendorong pertumbuhan yang inklusif

IMF juga berbagi keahlian, termasuk melalui Pusat Dukungan Teknis Regional Timur Tengah dan melalui dana perwalian yang spesifik untuk setiap negara (*country-specific trust funds*). Dukungan ini berfokus terutama pada upaya membangun kembali dan memperkuat lembaga-lembaga perekonomian, memperbaiki pembuatan kebijakan ekonomi, memperkuat pengelolaan keuangan publik dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil, memperkuat pengawasan dan intermediasi keuangan, dan menyiapkan statistik.

IMF telah memberikan dukungan keuangan kepada Afghanistan, Irak, dan Yordania, dengan mempertimbangkan dampak pengungsi dan penduduk yang tersingkir. Selain itu, IMF mendukung mobilisasi sumber daya tambahan dari berbagai donor dan lembaga keuangan internasional lainnya (Irak, Yordania, Lebanon). IMF memainkan peran kunci dalam mendukung dialog masyarakat internasional dengan melakukan kajian terhadap pembangunan ekonomi dan ikut serta dalam berbagai pertemuan donor (Libya, Somalia, Tepi Barat dan Gaza), serta konferensi-konferensi tingkat tinggi bertajuk Mendukung Syria dan Kawasan Sekitar (*Supporting Syria and the Region*) di London pada tahun 2016 dan di Brussels pada awal April 2017.



Aktuelle Ausbildungsangebote



Tanda di atas berbunyi "Tawaran pelatihan saat ini."



Reformasi Penetapan Harga Energi di Dunia Jazirah Arab

Turunnya harga minyak pada akhir tahun 2014 telah menimbulkan dampak yang sangat kuat terhadap negara-negara Jazirah Arab: para eksportir minyak di kawasan ini mengalami hilangnya milyaran dollar dari pendapatan mereka, sementara para importir minyak mengalami penurunan pendapatan remitansi dan investasi. Meskipun harga minyak bumi telah mengalami sedikit kenaikan hingga sekitar \$45–\$50 per barel pada tahun 2017, pasar berjangka memperkirakan bahwa harga minyak masih akan tetap rendah, sekitar \$55 per barel dalam jangka menengah.

Negara-negara di jazirah Arab menyadari realita baru tersebut. Banyak yang sudah menempuh langkah-langkah signifikan **untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan harga energi mereka yang terlalu rendah untuk membantu mereka melakukan konsolidasi posisi fiskal mereka.** Meski demikian, kajian IMF yang diterbitkan pada awal TA2018 menyebutkan bahwa masih terdapat ruang untuk melangkah lebih lanjut. Pada tahun 2015, subsidi energi sebelum pajak negara-negara Arab mencapai seperempat nilai subsidi dunia—\$117 milyar, atau lebih dari pendapatan Amazon, Microsoft atau Google pada tahun 2015 (*Gambar 1.12*). Angka ini mencakup biaya tidak langsung atau biaya hilangnya peluang (opportunity cost) dari harga energi yang rendah—pendapatan yang hilang akibat menjual dengan harga lebih rendah dari harga dunia.

Harga energi yang rendah menguntungkan mereka yang kaya, yang konsumsi energinya lebih besar, sementara manfaat ekonomi yang dihasilkan relatif rendah. **Dana yang digunakan untuk subsidi lebih baik diinvestasikan pada sektor-sektor yang menghasilkan imbal-balik yang lebih tinggi, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.** Subsidi juga mendorong distorsi industri dan mubazirnya konsumsi energi domestik, yang memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Subsidi juga memperbesar defisit anggaran, mengakibatkan tingginya utang dan menggeroti tabungan.

Terdapat banyak tantangan politik dan sosial terhadap reformasi harga energi. Namun pengalaman reformasi di berbagai negara membuktikan bahwa hal ini dapat dilakukan. Agar berhasil, reformasi harus bersifat luas, komprehensif, diterapkan secara bertahap, dan bebas politisasi. Masyarakat harus senantiasa mendapatkan informasi. Dan **kompensasi sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang miskin dan rentan, di mana harga energi yang lebih tinggi akan menambah beban mereka.**

Dengan harga minyak bumi dunia yang semakin turun, terdapat selisih yang lebih rendah antara harga energi domestik di negara-negara Arab dan harga patokan internasional (*Gambar 1.13*), kini adalah saat yang tepat untuk mereformasi penetapan harga energi. Secara rata-rata negara-negara Arab menggunakan 3 persen dari PDB mereka untuk subsidi energi pada tahun 2016. Jika pada saat itu mereka mengarahkan subsidi kepada investasi yang lebih produktif dalam hal modal fisik ataupun sumber daya manusia, mereka dapat menambah pertumbuhan sebesar 6 percentage point dari tambahan pertumbuhan selama enam tahun dan mengurangi utang pemerintah hingga 20 percentage point terhadap PDB selama periode yang sama.

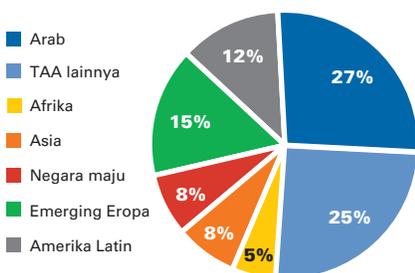
Untuk mengurangi dampak berbagai upaya reformasi, negara-negara tersebut dapat memilih paduan investasi, pengurangan utang, dan penggunaan cadangan pemerintah untuk langkah-langkah kompensasi.

Dengan dunia jazirah Arab yang berupaya mendorong pertumbuhan yang inklusif dan meningkatkan standar kehidupan, potensi manfaat dari reformasi penetapan harga energi sangat berarti. “Kini adalah saat yang tepat untuk melakukan berbagai upaya reformasi,” menurut Olivier Basdevant, salah satu penulis kajian IMF, “baik karena anda memang harus melakukannya atau karena kini lebih mudah dilakukan ketika selisih antara harga domestik dan harga dunia lebih rendah.”



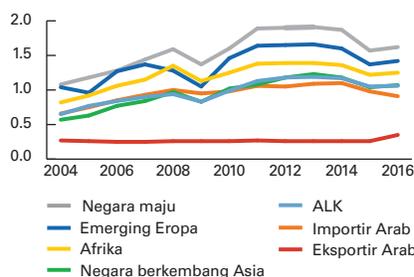
Olivier Basdevant, Salah satu penulis “If Not Now, When? Energy Price Reform in Arab Countries”

Gambar 1.12
Subsidi energi menurut kawasan, 2015



Sumber: Lembaga Energi Internasional; dan perhitungan staf IMF.
Catatan: TAT: Timur-tengah dan Asia Tengah.

Gambar 1.13
Rerata harga gas menurut kawasan, 2004–16
(Dollar Amerika per liter)



Sumber: Lembaga Energi Internasional; dan perhitungan staf IMF.
Catatan: ALK: Amerika Latin dan Karibia.

Brunei Darussalam: Teknologi untuk Dukungan IMF yang Sesuai Kebutuhan

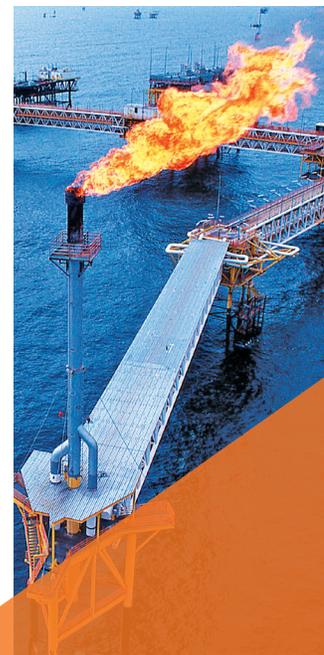
IMF berkonsultasi dengan 189 negara anggotanya terutama melalui pemeriksaan kesehatan perekonomian yang dilakukan setiap tahun. Selama konsultasi-konsultasi Artikel IV tersebut, pemerintah berbagai negara sering meminta dukungan dari IMF untuk membangun institusi-institusi melalui saran ahli yang disebut sebagai dukungan teknis (*technical assistance*), bersamaan dengan pelatihan. Hal inilah yang terjadi ketika misi-misi IMF yang lalu berkunjung ke Brunei Darussalam: pemerintah di negara kecil produsen minyak di pulau Kalimantan, Asia Tenggara, meminta IMF untuk memberikan dukungan bagi mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka.

Namun tim IMF menghadapi beberapa hambatan: **informasi tentang pilihan dukungan teknis tersebar** di berbagai departemen dalam IMF, dan Brunei Darussalam letaknya sangat jauh dari kantor pusat IMF, ditambah dengan keterbatasan tempat pelatihan dan jumlah staf, perjalanan yang dilakukan terlalu sering tidak dapat dilakukan baik bagi pejabat IMF maupun Brunei. “Solusinya,” menurut Pimpinan Misi IMF Seng Guan Toh, “adalah tim mengembangkan suatu paket informasi terpadu pada tawaran dukungan teknis kami dan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi yang dikembangkan oleh IMF, seperti pelatihan secara daring (*online*) yang bebas biaya dan Portal Data.”

Tim tersebut mengembangkan suatu daftar khusus sesuai kebutuhan dari berbagai pilihan dukungan teknis yang tersedia dari seluruh bagian di IMF, berdasarkan tawaran yang diberikan untuk negara-negara penghasil minyak lainnya: di sisi fiskal, penguatan pengelolaan keuangan publik dan dari sisi keuangan, berupa pengembangan sektor keuangan. **Tim mengidentifikasi kursus-kursus spesifik untuk setiap instansi pemerintah yang ditemui** dan menggabungkan menu-menu sesuai kebutuhan dari pilihan-pilihan dukungan teknis untuk setiap instansi tersebut. Misalnya, karena Brunei Darussalam adalah negara eksportir minyak, dari pertemuannya dengan para pejabat kementerian keuangan, tim memilih pelatihan IMF tentang “Manajemen Ekonomi Makro di Negara-negara yang Kaya Sumber Daya Alam (*Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries*).”

Pada misinya ke Brunei Darussalam pada bulan Februari 2017, pada akhir setiap pertemuan penting dengan para pejabat, **anggota tim mempresentasikan contoh bahan kuliah untuk menunjukkan sekilas pelatihan yang terkait dengan isu-isu perekonomian negara tersebut**, memutar suatu video tentang penggunaan portal pelatihan daring (*online*) dan menunjukkan data yang tersedia secara daring (*online*) kepada para pejabat yang hadir. Selain pertemuan dengan kementerian keuangan, tim juga bertemu dengan kantor perdana menteri, otorita moneter, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dan Departemen Ketenagakerjaan, dan lembaga kajian (*think tank*) terkemuka, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (*Centre of Strategic and Policy Studies*).

“Pendekatan ‘tiga T’ —teknologi, *technical assistance* (dukungan teknis), dan training (pelatihan)—memungkinkan instansi pemerintah Brunei untuk mengambil tawaran IMF guna membantu menangani berbagai permasalahan perekonomian,” tutur Toh. Beliau dan tim berharap negara tersebut dapat memperoleh manfaat yang lebih luas dari tawaran yang ada dan dapat memperluas pendekatan tersebut ke negara-negara lain sebagai cara untuk melaksanakan mandat IMF dengan lebih baik untuk membantu anggotanya.



“Pendekatan ‘tiga T’ teknologi, technical assistance (dukungan teknis)—dan training (pelatihan)—memungkinkan instansi pemerintah Brunei untuk mengambil tawaran IMF guna membantu menangani berbagai permasalahan perekonomian.”

— Seng Guan Toh, Pimpinan Misi IMF

ASIA DAN PASIFIK

IMF Bermitra dengan India untuk Membuka Pusat Pelatihan Baru

Kurang dari satu tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah India dan IMF pada tahun 2016, Pusat Pelatihan dan Dukungan Teknis Kawasan Asia Selatan atau South Asia Regional Training and Technical Assistance Center (SARTTAC) diresmikan pada tanggal 13 Februari 2017 di New Delhi. Pemilihan lokasi yang tepat untuk pusat tersebut, pembuatan desain yang fungsional, dan pelaksanaan pembangunannya memerlukan kemitraan yang erat antara pemerintah India, staff IMF, dan vendor-vendor lokal. Hasil yang diperoleh adalah fasilitas kelas dunia untuk pelatihan.

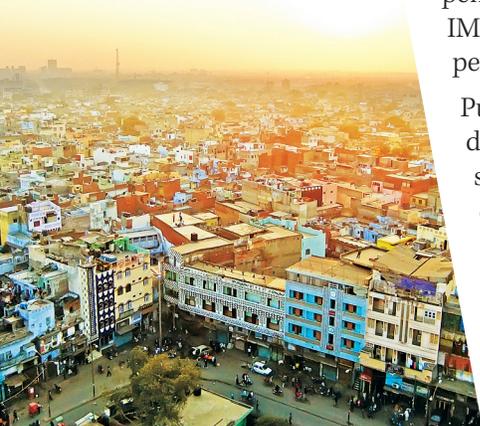
Pusat ini merupakan pusat terbaru dari jejaring global IMF yang terdiri dari 14 pusat dukungan teknis (technical assistance) dan pelatihan kawasan. Pusat ini dirancang sebagai percontohan untuk pengembangan kapasitas di masa depan milik IMF, dengan dipadukannya pelatihan dan dukungan teknis dalam satu atap. Para negara anggota di kawasan ini menyediakan sebagian besar pendanaan untuk pembangunan pusat tersebut, dan dilengkapi dengan berbagai sumber daya yang berasal dari sumbangan yang berasal dari Australia, Uni Eropa, Korea, dan Inggris.

SARTTAC merespon banyaknya permintaan dari negara-negara anggota (Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Sri Lanka) terhadap upaya pengembangan kapasitas dari IMF.

Asia Selatan adalah kawasan yang berkembang pesat dan merupakan tempat tinggal bagi seperlima penduduk dunia. Negara-negara di kawasan ini berjuang menghadapi tantangan peningkatan efisiensi dari belanja pemerintah, penguatan administrasi pajak, penguatan regulasi dan pengawasan sistem keuangan, modernisasi kebijakan moneter dan operasinya, dan memperbaiki statistik ekonomi makro. Melalui kursus pelatihan dan para ahli dukungan teknis yang menetap (resident technical assistance experts), SARTTAC akan memungkinkan IMF untuk memenuhi permintaan yang tinggi akan asistensi. Lokasi yang berada di kawasan memungkinkan pusat ini untuk fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan setiap negara dan menyesuaikan dukungannya sesuai situasi negara-negara anggota.

SARTTAC telah menjadi pusat yang aktif sejak didirikan. Konsisten dengan pendekatan sesuai permintaan (demand-driven), waktu telah diluahkan untuk mempelajari berbagai kebutuhan negara anggota. Kegiatan ini telah menghasilkan **program awal yang terdiri dari 30 pelatihan yang akan diberikan pada tahun kalender 2017, yang mencakup topik-topik fiskal, moneter, keuangan, dan statistik.** Pelatihan pertama, tentang diagnostik ekonomi makro, adalah untuk para staf dari Layanan Ekonomi India (Indian Economic Service), telah diikuti dengan berbagai pelatihan regional tentang analisa fiskal dan kebijakan moneter. Beberapa pelatihan juga diberikan di negara-negara anggota lain dan di tingkat subnasional di India, di mana terdapat permintaan yang kuat di tingkat negara bagian.

Pada tahun mendatang, selain pelatihan khusus sesuai kebutuhan dan proyek-proyek dukungan teknis yang bersifat praktik, SARTTAC akan mengundang negara-negara anggota untuk saling belajar (peer learning), pertukaran pegawai pemerintah antar negara, dan bermitra dengan institusi lokal di seluruh Asia Selatan.



Shaktikanta Das Sekretaris Kementerian Keuangan India dan Deputy *Managing Director* IMF Carla Grasso meresmikan Pusat Pelatihan dan Dukungan Teknis Kawasan Asia Selatan.

Anggota Parlemen Myanmar Memperkuat Pengelolaan dan Pengawasan

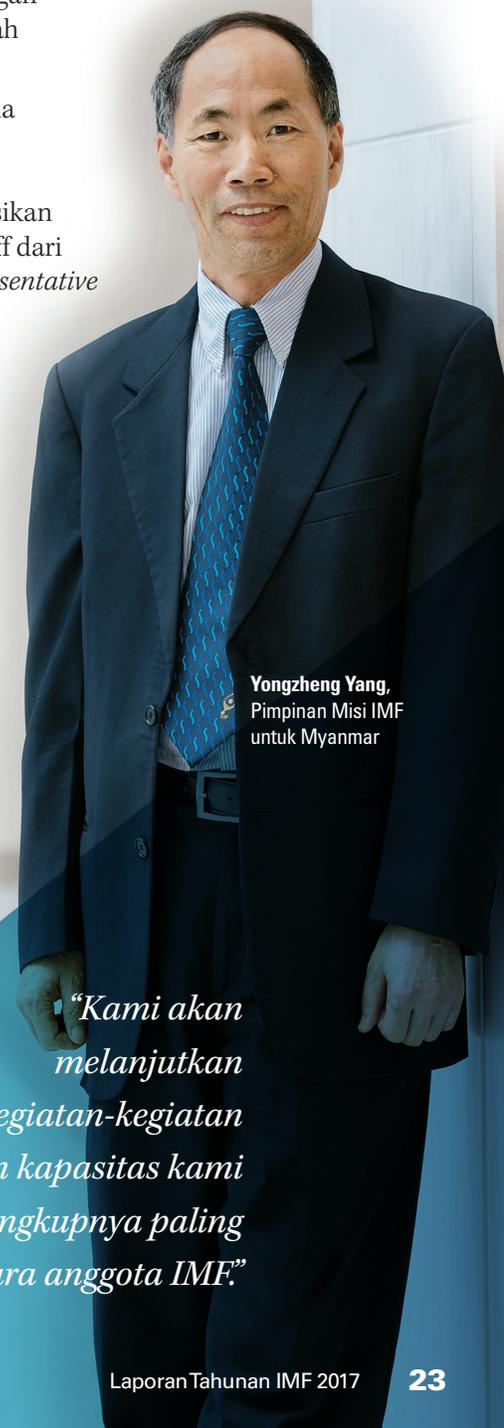
Sejak pemilihan umum bersejarah pada bulan November 2015, pemerintah demokratis baru di Myanmar (sebelumnya dikenal sebagai Burma) mulai memerintah pada bulan April 2016. Setelah terisolasi selama beberapa dekade, pemerintah memprioritaskan reformasi sektor keuangan yang sangat diperlukan, meningkatkan infrastruktur, dan mengakhiri konflik bersenjata dalam negeri untuk secara bertahap mengintegrasikan kembali Myanmar dengan perekonomian global.

Pengembangan kapasitas di Myanmar merupakan tugas berat saat negara ini melanjutkan transisi ekonominya. Kebutuhan tersebut semakin mendesak untuk parlemen yang baru saja terpilih, mengingat sebagian besar anggota parlemen sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Untuk mengatasi kebutuhan ini, anggota staff IMF dari berbagai departemen merancang suatu seminar tingkat tinggi untuk pengembangan kapasitas bagi Parlemen Bersatu Myanmar (*Union Parliament of Myanmar*), setelah berkonsultasi dengan para pimpinan parlemen.

Seminar tersebut, yang diselenggarakan pada bulan Desember 2016, berfokus pada upaya Myanmar untuk memperkuat pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas keuangannya. **Lebih dari 60 anggota parlemen dari tiga komisi ekonomi parlemen utama ikut serta dalam berbagai sesi interaktif**, yang dikoordinasikan dengan misi pemeriksaan kesehatan ekonomi tahunan IMF. Tim IMF dengan staff dari Departemen Asia dan Pasifik (termasuk Kantor Perwakilan Tetap (*Resident Representative Office*), Kantor Dukungan Teknis (*Technical Assistance Office*) untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Republik Myanmar Bersatu, dan Kantor Regional di Jepang); departemen komunikasi, bidang fiskal, moneter dan pasar modal, dan statistik; dan Institut Pelatihan Regional Singapura, dengan dukungan keuangan dari Pemerintah Jepang.

Interaksi antara anggota parlemen dan tim IMF memberi kesempatan yang unik bagi para anggota parlemen tersebut untuk mendiskusikan bersama kebijakan dan isu-isu teknis. Para anggota parlemen secara sangat tertarik pada pendekatan terpadu antara pengembangan kapasitas dengan pemantauan ekonomi (*economic surveillance*). Hal ini **membantu mereka secara lebih baik dalam menerapkan isu-isu teknis yang didiskusikan terhadap bidang kebijakan yang mereka hadapi secara reguler** dalam pelaksanaan tanggung jawab pengawasan. Seminar lanjutan tentang pengelolaan keuangan pemerintah untuk Komisi Parlemen Gabungan untuk bidang Keuangan Publik (*Parliamentary Joint Public Accounts Committee*) telah dijadwalkan pada pertengahan 2017.

Yongzheng Yang, Pimpinan Misi IMF untuk Myanmar, merangkum strategi IMF untuk negara tersebut: “Pertukaran pengetahuan memainkan peran penting dalam membantu pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai sasaran mereka yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas kami di Myanmar, yang lingkungannya paling luas di antara para anggota IMF. Memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan perekonomian kami sangat penting dalam menjalin hubungan yang efektif dengan negara ini.”



Yongzheng Yang,
Pimpinan Misi IMF
untuk Myanmar

“Kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas kami di Myanmar, yang lingkungannya paling luas di antara para anggota IMF.”

“...tentu saja, fasilitas FCL, yang telah dirasakan manfaatnya oleh Meksiko selama beberapa tahun, merupakan suatu bukti untuk sebuah kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan, berkat kepemimpinan negara ini, baik di tingkat Bank Sentral, maupun tingkat Kementerian Keuangan.”

Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF, pada pengarahan media Komite Moneter dan Keuangan Internasional, 22 April 2017

BELAHAN DUNIA BARAT

Meksiko: Flexible Credit Line Berperan sebagai Pelindung di Dunia yang Cepat Berubah

Selama dekade terakhir, Meksiko telah memperdalam integrasinya ke perekonomian global melalui jalur-jalur perdagangan dan keuangan. Kondisi ini telah mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing, menekan beban pembiayaan, dan diversifikasi basis investor. Pada tahun 2016, arus investasi portfolio asing di Meksiko mencapai \$26.7 milyar (2.6 persen dari PDB), dan non penduduk menguasai 35 persen dari obligasi pemerintah dengan denominasi mata uang dalam negeri (*Gambar 1.14*). Kehadiran investor asing yang kuat di Meksiko mencerminkan keyakinan mereka terhadap kekuatan kerangka kebijakan perekonomian dan kedalaman serta likuiditas dari nilai tukar mata uang asing dan pasar obligasi negara tersebut.

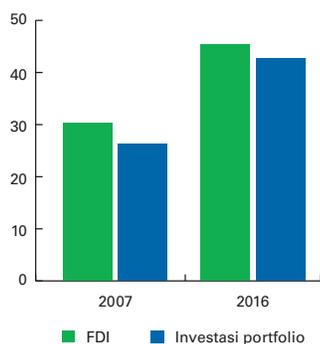
Peso Meksiko merupakan mata uang negara emerging market yang menduduki peringkat kedua sebagai mata uang yang paling aktif diperdagangkan di dunia, dengan volume perdagangan global harian senilai \$97 milyar. Kebijakan ekonomi makro dan kerangka kebijakan Meksiko yang sangat kuat telah membantu negara ini mengaruhi lingkungan eksternal yang kompleks yang ditandai dengan adanya ketidakpastian di pasar uang. Kebijakan moneter dipandu oleh kerangka inflasi tertarget dalam konteks nilai tukar yang fleksibel. Kebijakan fiskal bertumpu pada undang-undang tanggung jawab fiskal, dan pemerintah berkomitmen untuk menurunkan rasio utang pemerintah dibanding PDB (*public debt to GDP ratio*) dalam jangka menengah. Kerangka regulasi dan pengawasan keuangan sudah cukup kokoh.

Untuk mendukung strategi ekonomi makro Pemerintah Meksiko secara keseluruhan dan memberikan perlindungan terhadap risiko, pada bulan Mei 2016 Dewan Eksekutif IMF telah menyetujui sebuah aransemen dua-tahun untuk Meksiko di bawah Fasilitas Utang Fleksibel atau *Flexible Credit Line* (FCL) dengan nilai sebesar \$85 milyar. FCL ini telah terbukti efektif selama TA2017 saat Peso menghadapi tekanan yang sifatnya temporer. Ini adalah aransemen keenam untuk Meksiko, dan pihak Pemerintah sekali lagi bermaksud memperlakukannya sebagai upaya berjaga-jaga. Aransemen-aransemen sebelumnya telah memberikan perlindungan yang berharga terhadap tail risks segera setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008, saat terjadinya krisis kawasan Euro, dan selama periode bergejolak menjelang dimulainya normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

FCL tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pinjaman untuk pencegahan krisis dan pinjaman untuk mitigasi krisis bagi negara-negara dengan kerangka kebijakan dan rekam jejak kinerja perekonomian yang sangat kuat yang mengalami pengetatan dana. Dua negara lain, Kolumbia dan Polandia, juga telah memanfaatkan aransemen-aransemen FCL. Meskipun ketiga negara tersebut belum menarik dananya, fasilitas kredit ini telah memberikan **perlindungan yang sangat bernilai bagi ketiga negara dan membantu meningkatkan kepercayaan pasar selama periode di mana peningkatan risiko terjadi.**

Gambar 1.14

Meksiko, penanaman modal asing langsung (FDI) dan kewajiban investasi portfolio, 2007 dan 2016 (Persen terhadap PDB)



Sumber: Otoritas nasional; dan perkiraan staf IMF.
Catatan: FDI: foreign direct investment (penanaman modal asing langsung).

Langkah Berani Argentina Dalam Mencegah Krisis

Saat Pemerintah Argentina yang baru dilantik pada bulan Desember 2015, mereka menghadapi ketidakseimbangan ekonomi makro yang meluas, distorsi ekonomi mikro, dan kerangka kelembagaan yang melemah. Tingkat konsumsi tinggi yang tidak berkesinambungan, tingkat investasi yang terendah sepanjang sejarah, dan defisit anggaran yang cukup besar yang didanai dari pencetakan uang serta inflasi. Distorsi di tingkat mikro mencakup jejaring kendali administratif yang sangat luas—seperti hambatan perdagangan, pembatasan pertukaran valuta asing, dan pengendalian harga—dan iklim usaha yang mengikis daya saing serta menghambat pertumbuhan jangka menengah. **Ancaman krisis keuangan yang serius nampaknya akan segera terjadi.**

Pemerintah “kini tengah melihat permasalahan yang ada di hadapan mereka dan mengatasinya dengan cepat,” tutur Pimpinan Misi IMF Roberto Cardarelli pada bulan November 2016, tentang publikasi dari review IMF pertama terhadap perekonomian negara tersebut (dikenal sebagai konsultasi Artikel IV) sejak 2006. **Pemerintah telah mengambil langkah berani untuk mengatasi ketidakseimbangan dan mencegah krisis,** Cardarelli menjelaskan, menghapus pembatasan pertukaran valuta asing, menjadikan nilai tukar mengambang, mengilangkan pembatasan akses terhadap mata uang asing, menghapus pajak ekspor (kecuali untuk kedelai, yang diturunkan) dan menangani tuntutan hukum para kreditur yang menghambat upaya restrukturisasi utang Argentina, serta memulihkan akses ke pasar kredit.

Pemerintah menetapkan target-target fiskal dan inflasi, dan mulai mengurangi subsidi energi yang kurang efektif. Badan statistik nasional dibangun kembali dan pada pertengahan 2016 mulai mempublikasikan statistik resmi baru sesuai dengan standar internasional.

Sementara membangun pondasi untuk pertumbuhan yang kuat di masa mendatang adalah penting, langkah-langkah yang dilakukan untuk membalikkan ketidakseimbangan dan distorsi yang serius yang ada ternyata secara tidak terhindarkan memiliki dampak jangka pendek yang merugikan perekonomian Argentina. Saat misi IMF bertemu dengan para pejabat senior, beserta perwakilan dari sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil, fokus utama diskusi tersebut adalah bagaimana **menjaga keberlangsungan pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat miskin dari dampak yang timbul dari pemulihan stabilitas ekonomi makro.** Konsultasi yang dilakukan mencakup agenda reformasi negara ini yang ambisius yang dirancang untuk menghasilkan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi swasta dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan merata.

Dengan sekitar sepertiga dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, pengentasan kemiskinan adalah prioritas mutlak pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa **perekonomi yang dinamis adalah cara terbaik untuk menciptakan lapangan kerja dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan.** Setelah mengalami pengetatan pada tahun 2016, kegiatan perekonomian di Argentina diharapkan dapat tumbuh sebesar 2.2 persen pada tahun 2017, berkat lebih kuatnya konsumsi dan investasi pemerintah dan 2.3 persen pada tahun 2018, ini mencerminkan pemulihan bertahap dari investasi swasta dan ekspor (Tabel 1.1.)



Roberto Cardarelli,
Pimpinan Misi IMF
untuk Argentina

Tabel 1.1
Argentina, pertemuan dalam PDB riil, inflasi, neraca transaksi berjalan, dan pengangguran, 2016 dan proyeksi 2017–18

	2016	2017 (proyeksi)	2018 (proyeksi)
PDB riil	-2.3	2.2	2.3
Inflasi (tahun ke tahun)	—	21.6	17.2
Neraca Transaksi Berjalan	-2.6	-2.9	-3.4
Pengangguran	8.5	7.4	7.3

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, April 2017.

Reformasi Albania Membuahkan Hasil

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Albania hampir berhenti saat krisis ekonomi tahun 2008 menurunkan permintaan dari Yunani dan Italia, sebagai mitra-mitra dagang utamanya. Pada saat yang sama, utang pemerintah melonjak dan pinjaman jatuh tempo terakumulasi karena pengeluaran besar-besaran pada masa pemilu, sistem pensiun yang tidak berkelanjutan, dan sektor kelistrikan yang lemah. Sistem perbankan, yang sangat diandalkan oleh pemerintah untuk berutang, telah melemah akibat rasio utang jatuh tempo yang tinggi, meningkatkan tekanan terhadap pembiayaan.

Untuk membantu mengatasi tantangan fiskal dan keuangan tersebut serta memulihkan pertumbuhan ekonomi, negara tersebut mengajukan pinjaman IMF, yang kemudian disetujui Dewan Eksekutif pada bulan Februari 2014. Aransemen 36 bulan di bawah Fasilitas Pendanaan yang Diperluas (Extended Financing Facility) yang dimaksudkan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan utang pemerintah yang meningkat cepat yang mengancam stabilitas perekonomian, dengan cara memperkuat keuangan pemerintah, menjaga stabilitas keuangan, dan menerapkan reformasi struktural yang terfokus pada perbaikan sektor energi dan iklim usaha.

Pada bulan Februari 2017, program tersebut berhasil diselesaikan dan Albania memasuki masa pemantauan pasca program. Setelah misi terakhir selesai, mantan Menteri Keuangan Arben Ahmetaj melaporkan dalam sebuah konferensi pers bahwa **pertumbuhan ekonomi sudah pulih dan diharapkan mencapai 3.7 – 3.8 persen pada tahun 2017 dari 3.4 persen pada tahun sebelumnya** (Tabel 1.2.).

Ia memberikan apresiasi bahwa kinerja perekonomian yang kuat tersebut adalah berkat reformasi ekonomi makro dan reformasi fiskal yang telah ditempuh, di mana, menurutnya “juga terkait erat terhadap semua reformasi lain yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir, seperti reformasi dana pensiun, reformasi sektor energi, dan reformasi pengelolaan keuangan publik, reformasi administrasi perpajakan,” dan sebagainya.

Reformasi-reformasi tersebut juga telah menyebabkan peningkatan upah dan pensiun, jumlah orang bekerja, jumlah perusahaan, dan penanaman modal asing langsung, ucap Ahmetaj.

Ketua Tim IMF Anita Tuladhar sependapat bahwa program tersebut telah berhasil membawa Albania menuju jalur pemulihan dengan keuangan publik yang baik: “Berkat komitmen pemerintah Albania, kami dapat mendukung berbagai reformasi yang penting bagi pertumbuhan. Program ini memperkuat kerangka kelembagaan, mengurangi kerentanan ekonomi, dan membantu menjaga stabilitas ekonomi meski dengan kondisi eksternal yang sulit,” jelasnya.

Albania sedang melanjutkan reformasi untuk mendukung pertumbuhan dan memperkuat sektor keuangan sambil memelihara konsolidasi fiskal dengan

tujuan menurunkan utang ke tingkat kurang dari 60 persen dari PDB. Albania telah meluncurkan inisiatif reformasi peradilan yang didukung oleh Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan terkait tata kelola pemerintahan (governance) dan sistem peradilan yang tidak efisien. Bergantung pada kemajuan nyata yang dicapai melalui reformasi peradilan, Komisi Eropa telah merekomendasikan untuk membuka negosiasi diterimanya Albania ke dalam Uni Eropa.

Anita Tuladhar,
Ketua Tim IMF
untuk Albania



Tabel 1.2

Albania, berbagai indikator ekonomi utama, 2013 dan 2016

	2013	2016
Pertumbuhan PDB (persen)	1.0	3.4
Keseimbangan primer (persen dari PDB)	-2.0	0.2
Keseimbangan umum (persen dari PDB)	-5.2	-2.2
Penerimaan pajak (persen dari PDB)	22.0	24.9
Utang tidak lancar (persen)	23.5	18.3

Sumber: Otoritas nasional Albania; dan perhitungan staf IMF

Spanyol: Mempertahankan Pemulihan yang Mengesankan

Sebagai salah satu negara di kawasan Euro yang paling parah terdampak krisis keuangan global, Spanyol telah mengalami pemulihan yang mengesankan. Ekonomi tumbuh lebih dari 3 persen pada tahun 2015 dan 2016 dan diharapkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebelum krisis pada tahun 2017 (*Gambar 1.15*). Sejak puncak terjadinya krisis, lebih dari 1.5 juta orang yang sebelumnya menganggur telah memperoleh pekerjaan. **Program-program reformasi cepat selama tahun 2011–13, seperti langkah-langkah untuk memastikan adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja yang lebih baik, telah membantu perekonomian Spanyol untuk mengembalikan daya saingnya** dan telah berkontribusi pada menguatnya penciptaan lapangan kerja, sementara reformasi perbankan telah menjadikan sektor ini lebih tangguh. Harga minyak bumi dan suku bunga yang lebih rendah, bersamaan dengan stimulus fiskal pada tahun 2015-16, yang telah mendorong pertumbuhan.

Berkat lonjakan ekspor, Spanyol telah mencatat surplus transaksi berjalan (current account surplus) selama empat tahun. Banyak perusahaan yang telah mencapai kemajuan yang baik dalam hal pembersihan neraca mereka, sementara utang rumah tangga telah mengalami penurunan hingga kisaran median Euro, meskipun secara angka absolut masih tinggi. Perbankan Spanyol telah meningkatkan rasio modal dan menurunkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan), meskipun terdapat pengetatan kredit.

Meski demikian, tingkat pengangguran tetap tinggi yaitu sekitar 18 persen, dan bahkan pengangguran di kalangan pemuda lebih tinggi, yaitu pada 42 persen, hampir dua kali lipat rata-rata kawasan Euro. Sebagian besar dari orang-orang tersebut tidak punya pekerjaan selama beberapa tahun. Suatu pasar tenaga kerja dua lapis (two-tiered labor market)—dengan sebagian besar persentase pekerja di pekerjaan dengan upah yang rendah dan kontrak sementara—masih tersebar luas, dan pertumbuhan produktivitas rendah.

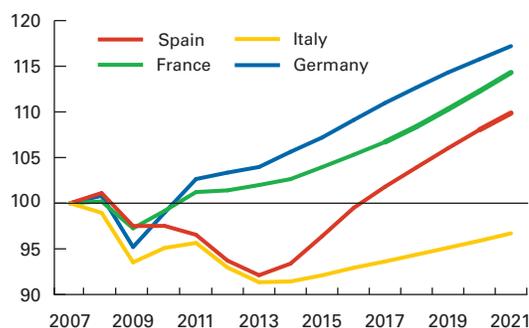
Utang pemerintah telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak awal krisis, hingga 100 persen PDB, membatasi ruang bagi pemerintah untuk bermanuver. Utang pemerintah, ditambah dengan utang sektor swasta yang sangat tinggi dan posisi investasi internasional yang masih mengalami negatif netto yang besar, menjadikan perekonomian Spanyol rentan terhadap tekanan.

Tim IMF dipimpin oleh Andrea Schaechter, merekomendasikan bahwa Spanyol dapat menggunakan prestasi yang dicapai dari reformasi untuk mencapai keberhasilan selanjutnya dengan melakukan hal sebagai berikut:

- Melanjutkan penyesuaian fiskal untuk menurunkan defisit dan utang pemerintah
- Memperkuat kebijakan pasar tenaga kerja dengan secara lebih efektif menargetkan kalangan pemuda dan orang-orang yang telah lama menganggur dan dengan mengurangi sistem dua lapis, untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan keadilan
- Mendorong penelitian dan pengembangan, dan kompetisi di pasar produk dan jasa, untuk mendorong produktivitas dan pendapatan
- Memperkuat neraca perbankan dan memperbaiki kualitas pengawasan dan manajemen risiko sistemik

Penilaian Sektor Keuangan Spanyol oleh IMF 2017 akan menyajikan berbagai pilihan kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan di Spanyol.

Gambar 1.15
Spanyol, Perancis, dan Jerman,
pertumbuhan riil PDB, 2007–21
(Indeks, 2007=100)



Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, dan prakiraan staf IMF.

“Kesejahteraan
ekonomi dunia

dan keluarga
bangsa-bangsa

bergantung pada keinginan
yang kuat

untuk bekerja
sama.”

Christine Lagarde
Direktur Pelaksana IMF



International Monetary Fund
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

www.imf.org/AR2017